

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang didapatkan dari pihak eksternal yang digunakan untuk mengolah atau memenuhi kebutuhan perusahaan. Menurut Prapaska (2012) sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari internal dan eksternal. Kebijakan yang berhubungan dengan pendanaan dapat diperoleh melalui hutang atau ekuitas. Kebanyakan perusahaan menganggap penggunaan hutang lebih aman dibandingkan menerbitkan saham baru. Beberapa alasan perusahaan menggunakan hutang daripada saham baru, yaitu (1) terdapat pajak atas pembayaran bunga; (2) biaya transaksi tentang pengeluaran hutang lebih ekonomis dibandingkan biaya transaksi penerbitan saham baru; (3) pendanaan hutang lebih mudah didapatkan daripada pendanaan saham; (4) Kontrol manajemen lebih besar dengan adanya penggunaan hutang baru daripada saham baru.

Pengambilan kebijakan menggunakan hutang harus disertai pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko hutang. Pada sektor pertambangan selalu mengalami peningkatan hutang tiap tahun mulai 2014 hingga 2016 yang bertujuan untuk perluasan usaha, diantaranya yaitu perusahaan milik Bakrie yaitu PT. Bumi Resources, Tbk mempunyai hutang semakin meningkat. Tahun 2015 total hutang PT. Bumi Resources, Tbk sebesar Rp 62,2 triliun yang mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan total sebesar Rp.

51,25 triliun (www.bisnis.com, 10 Juli 2018). Pada maret 2016 hutang PT. Bumi Resources, Tbk mengalami peningkatan sebesar 2,8% dari jumlah hutang tahun 2015. Hutang jangka pendek PT. Bumi Resources, Tbk tahun 2016 sebesar US\$ 220,78 juta. Sedangkan hutang jangka panjangnya sebesar US\$ 3,6 miliar dan untuk obligasi konversi sebesar US\$ 374,7 juta (www.bisnis.com, 10 Juli 2018) . Tidak hanya itu, PT. Bumi Resources, Tbk per Juni 2012 memiliki hutang sebesar 3.789,63 juta dollar AS (www.kompas.com, 10 Juli 2018). PT. Bumi Resources ini termasuk perusahaan yang memiliki hutang terbanyak dari perusahaan milik bakrie yang lainnya. Perusahaan milik bakrie seringkali telilit hutang dan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Kesulitan perusahaan dalam mengatasi hutangnya dikarenakan kurang tepat dalam memperkirakan kinerja perusahaan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perusahaan diberbagai sektor salah satunya perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan Indonesia sendiri berkontribusi dalam industri global dengan hasil produksi berupa batubara, tembaga, emas, timah, dan nikel. Pada tahun 2015 perusahaan pertambangan Indonesia pernah mengalami masa buruk. Menurut laporan industri Pwc (*PricewaterhouseCoopers*) menjelaskan kapitalisasi pasar keseluruhan perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan dari Rp 255 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 161 triliun pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan bahan tambang dari China mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan pertambangan memburuk Tahun 2016 kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami

peningkatan menjadi Rp 198 triliun, hal ini dipicu kenaikan harga komoditas, namun peningkatan ini belum dianggap baik karena nilainya masih kecil dibandingkan dengan pada tahun 2014 sehingga peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan Indonesia masih mengalami perbaikan. Pada tahun 2017 perusahaan pertambangan Indonesia menurut Indeks Tata Kelola tambang di Indonesia pada *Resource Governance Index* (RGI/Indeks Tata Kelola Sumber Daya) tahun 2017 mencapai angka memuaskan, yaitu dengan nilai 68 dari indikator nilai 100, dan menduduki peringkat ke 11 di antara 89 penilaian khusus tingkat negara di kawasan Asia Pasifik ([www.koransulindo.com](http://www.koransulindo.com), 2017).

Kebijakan hutang sangat dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Membuat kebijakan hutang tidak mudah karena akan menimbulkan kepentingan yang berbeda antara pemegang saham (*shareholder*) dengan pihak manajemen (*principal*) yang biasa disebut dengan konflik keagenan (*agency problem*). Konflik keagenan akan menimbulkan biaya keagenan hutang atau biasa disebut *agency cost*. Beberapa alternatif yang dapat mengurangi *agency cost* yaitu :

Alternatif pertama kepemilikan manajerial berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan. Dimana kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi keputusan pencarian dana melalui hutang. Jika manajemen memiliki kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan, maka manajemen menjadi berhati-hati dalam mengelola kebijakan hutang perusahaan, karena kekayaan pribadi manajer secara tidak langsung berkaitan erat dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajer akan berusaha mengurangi tingkat hutang secara optimal sehingga akan mengurangi biaya keagenan. Menurut Andhika Ivona

Murtiningtyas (2012) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, akan tetapi menurut Nur Febriyana Dewi (2017) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.

Alternatif kedua, kepemilikan institusional memiliki berperan yang juga penting dalam mengurangi konflik keagenan. Karena kepemilikan institusional mengontrol pihak institusional agar keputusan yang dilakukan oleh manajer dapat dikontrol, adanya aktivitas institusional dilakukan agar manajer tidak melakukan tindakan *opportunistic*. Menurut Elva Nuraina (2012) dan Andhika Ivona Murtiningtyas (2012) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, tetapi menurut Setiawati dan Raymond (2014) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.

Alternatif ketiga, kebijakan dividen akan memiliki pengaruh pada tingkat penggunaan utang suatu perusahaan. Kebijakan dividen yang stabil akan menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar jumlah dividen yang tetap tersebut. Pembayaran dividen dapat memberikan pengendalian terhadap konflik keagenan, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik menurut Kristiana (2014). Menurut Andhika Ivona Murtiningtyas (2012) dan Nur Febriyana Dewi (2017) mengatakan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan menurut Niken Anindhita (2017) mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.

Alternatif keempat, ukuran perusahaan juga menjadi pertimbangan sebagai faktor yang dapat memengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Perusahaan yang besar akan lebih mudah dikenal oleh publik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan dengan mudah dapat mengakses pasar modal. Maka perusahaan besar memiliki kemudahan dan kemampuan mendapatkan dana. Menurut Siti Fatimatul Zuhria (2016) dan Nur Febriyana Dewi (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan menurut Siti Fatimatul Zuhria (2016) dan Nur Febriyana Dewi (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.

Berdasarkan pertimbangan fenomena dan *gap* yang telah dipaparkan maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar BEI Periode 2014-2017.**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan?

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh Kepemilikan Manjerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman, pembanding, dan masukan terhadap studi tentang topik ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitan selanjutnya yang terkait dan sejenis.

#### 2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi perusahaan dalam meminimalisir biaya agensi (*agency cost*) dengan mengetahui variabel-variabel yang dapat menimbulkan konflik agensi (*agency conflict*).

### 3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan tentang penjualan dan pembelian saham.

## 1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan bagaimana latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dapat diuraikan bagaimana penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III        METODE PENELITIAN:**

Pada bab ini dapat diuraikan bagaimana mengenai kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis, sumber data, definisi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV        GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil penelitian.

## **BAB V    PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.

